

# Strategi Pemberdayaan Terintegrasi:<sup>1</sup>

Sebuah Perspektif Sosial-Ekonomi-Lingkungan dalam Pemberdayaan Komunitas di Kota Depok

Rissalwan Habdy Lubis<sup>2</sup>

Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Hal ini terutama terjadi pada negara sedang berkembang, yang pada gelombang awal pembangunan pasca kolonialisme diidentikkan dengan peningkatan pendapatan per kapita atau populer disebut sebagai strategi pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997: 7). Ide dasar dari pembangunan berbasis ekonomi ini adalah pertumbuhan yang akan membawa dampak menetes ke bawah (*trickle down effect*).

Dengan demikian pembangunan tidak perlu mengembangkan semua sektor yang ada, namun hanya perlu membangun sektor tertentu yang cukup mempunyai daya dan kapasitas ekonomi tinggi, terutama dalam hal mengakumulasi modal. Dalam masa orde baru, sektor utama penggerak pembangunan adalah perbankan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan deregulasi perbankan yang mempermudah dibukanya usaha perbankan di Indonesia, yang tertuang dalam paket Oktober (pakto) 1988 dan paket Desember (pakdes) 1988 (Sjahrir, 1994: 95).

Penerapan konsep *trickle down effect* tersebut ternyata tidak hanya terjadi dalam konteks sektoral, melainkan juga melebar ke dalam konteks spasial. Pembangunan yang bertujuan pertumbuhan telah menciptakan daerah-daerah yang mendapatkan perhatian pembangunan yang lebih dari daerah lainnya (Gore, 1984: 25-27). Dalam kenyataannya di Indonesia, seolah-

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam acara Seminar Kesejahteraan Sosial, Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dengan tema "Gerakan Pemberdayaan guna Pengentasan Kemiskinan menuju pencapaian MDGs dalam Perspektif Pembangunan Kesejahteraan Sosial" di Kantor DNIKS Lt. 2, jalan Tanah Abang Timur No. 15 Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011.

<sup>2</sup> Pengajar di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia; Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS).

olah ada polarisasi antara kota dan desa, demikian pula antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Daerah perkotaan dan khususnya yang berada di kawasan Barat Indonesia telah menjadi sentral pembangunan selama masa orde baru. Industri hulu hingga hilir berkembang dengan pesat di tempat tersebut. Sementara daerah pedesaan dan daerah lainnya di kawasan Timur, telah menjadi pemasok bahan baku industri tanpa memperoleh hasil yang cukup berarti (Warpani, 1984: 67-68; Mashoed, 2004: 7-8).

Adapun penerapan paradigma pertumbuhan yang diharapkan dapat menciptakan *trickle down effect*, ternyata telah menciptakan jurang kesenjangan yang sangat dalam baik secara sektoral maupun secara spasial. Secara spasial, kesenjangan yang ada telah mendorong terjadinya radikalisme di sejumlah daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam pembangunan atau malah justru hanya semata-mata dieksploitasi untuk tujuan pembangunan. Hal inilah—misalnya—yang mendorong tuntutan memerdekakan diri dari Indonesia seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, karena hasil alam kedua daerah tersebut terus dikuras atas nama pembangunan namun hasilnya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, kemiskinan menjadi fenomena yang meluas di tengah masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu isu yang paling bermasalah dalam pembangunan hingga saat ini. Di beberapa bagian di dunia, pembangunan ekonomi belum terakomodasi dengan meningkatkan derajat kemajuan sosial. Meskipun kemakmuran ekonomi yang merupakan ciri dari keberhasilan pembangunan telah tercapai, tetap saja masih ditemukan masalah kemiskinan. Hal inilah yang disebut sebagai pembangunan yang terdistorsi (*distorted development*).

Midgley (1995: 4), menjelaskan fenomena pembangunan yang terdistorsi ini sebagai berikut

*“Distorted development exists in societies where economic development has not been accompanied by a concomitant level of social development. In this situation, the problem is not an absence of economic development, but rather a failure to harmonize economic and social development objectives, and to ensure that the benefits of economic progress reach the population as a whole ”.*

“Pembangunan terdistorsi ada dalam suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya tidak disertai dengan suatu tingkat yang

memadai dari pembangunan bidang sosial. Dalam situasi ini, masalahnya bukanlah pada ketiadaan pembangunan ekonomi, tetapi lebih pada kegagalan untuk mengharmonikan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, dan juga menjamin bahwa keuntungan dari kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat”.

Kegagalan yang memunculkan adanya pembangunan yang terdistorsi ini, disebabkan oleh bukan karena kekurangan pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi kegagalan yang terjadi adalah kegagalan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan obyektifitas pembangunan bidang sosial. Serta sasaran dari pembangunan ekonomi yang tidak menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini seperti yang terjadi di banyak negara dunia ketiga, dimana terjadi penyimpangan pembangunan. Manifestasi dari pembangunan yang terdistorsi ini tidak saja pada kemiskinan, deprivasi atau tingkat kesehatan yang rendah dan perumahan yang tidak mencukupi, tetapi lebih kepada partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan.

Midgley (1995: 7-10) menegaskan bahwa untuk dapat mengatasi permasalahan pembangunan yang terdistorsi ini (*distorted development*) memang dibutuhkan perspektif baru dalam upaya pembangunan. Perspektif baru tersebut adalah perspektif pembangunan sosial, yang merupakan aplikasi dari konsep kesejahteraan sosial—khususnya dalam prakteknya di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Midgley melihat pembangunan sosial tidak hanya berurusan dengan pembangunan (ekonomi) yang tertinggal, tetapi juga lebih terkait dengan pembangunan (ekonomi) yang tidak membawa pada kesejahteraan.

Midgley (1995: 25) menjelaskan bahwa pembangunan sosial adalah:

*“social development is defined as a process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development”.*

“sebuah proses perubahan sosial yang terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang berhubungan dengan proses dinamis dalam pembangunan ekonomi.”

Pembangunan sosial berupaya menggantikan pendekatan yang bersifat residual dan institusional yang mendominasi pemikiran di masa lalu. Pendekatan pembangunan sosial mengatasi perdebatan antara residualis-institusionalis dengan cara mengaitkan kesejahteraan sosial secara langsung dengan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Arahnya adalah mencoba menerapkan pengalaman dari negara-negara maju yang telah berhasil menghubungkan tuntutan kebutuhan sosial yang sesuai dengan kemampuan pembangunan ekonomi. Namun demikian, Midgley (1995: 4-5) menjamin bahwa pendekatan pembangunan sosial tetap relevan dengan semua bentuk masyarakat yang sedang berusaha untuk meningkatkan pembangunannya.

Pendekatan ini menekankan perlunya komitmen lebih luas dalam pembangunan ekonomi dan menitikberatkan pentingnya intervensi-intervensi sosial yang berjalan searah dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Ada tiga tipe strategi tertentu dalam konteks pembangunan sosial ini (Midgley, 1995: 102-125) yaitu: strategi pembangunan sosial oleh individu, strategi pembangunan sosial oleh komunitas, dan strategi pembangunan sosial oleh pemerintah.

Pendekatan baru ini harus juga mempertimbangkan konteks penanganan masalah perkotaan yang lebih luas, yakni mencakup:

- Pembangunan (*development*)
- Pelayanan (*services*)
- Pemberdayaan (*empowerment*)
- Penegakan hukum (*law enforcement*)
- Demokratisasi (*democratization*)

Artinya, menata kembali perspektif pembangunan dalam kerangka yang lebih luas dan memperhatikan berbagai konteks dan isu kontemporer adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya di wilayah yang berkarakteristik perkotaan seperti Kota Depok.

## URGENSI PEMBERDAYAAN BAGI KOTA DEPOK

Kota Depok memiliki karakteristik sosiologis yang masih mencerminkan perpaduan dua sifat berupa sifat perkotaan (*urban*) dan sifat pedesaan (*rural*). Sifat perkotaan (*urban*) yang ada di Kota Depok berbasiskan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, sementara sifat pedesaan (*rural*) berbasiskan lahan pertanian yang aktivitas produksinya juga mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan, terutama bagi DKI Jakarta (Suryana, 2003). Karakteristik ini terbentuk karena pada awalnya wilayah Kota Depok tidak dipersiapkan untuk tumbuh dan berkembang sebagai kota yang mandiri, melainkan hanya direncanakan bagi pengembangan kawasan perumahan bagi penduduk yang bekerja di Jakarta atau dikenal dengan istilah *dormitory town*. Hal ini diwujudkan dengan dibukanya kawasan permukiman Depok tahap 1 (yang sekarang ini dikenal dengan perumahan Depok 1) oleh Perum Perumnas pada pertengahan tahun 1970-an, dan kemudian disusul dengan pengembangan permukiman Depok tahap 2 hingga ke wilayah Timur dan Utara (*Kompas*, 19 November 2003). Hingga pada pertengahan tahun 1980-an, kawasan Perumnas Depok menjadi kompleks perumahan yang terbesar di Asia Tenggara.

Dengan demikian, penyediaan sarana dan prasarana serta pola jaringan pelayanannya semata-mata hanya untuk kepentingan kawasan permukiman dan kurang mempertimbangkan aspek pengelolaan wilayah sebagai suatu wilayah administratif. Percepatan pertumbuhan sarana dan prasarana di Depok, terjadi setelah sebagian besar kegiatan akademis Universitas Indonesia dipindahkan ke Depok yang menempati areal 318 hektar pada tanggal 5 September 1987 (*Kompas*, 19 November 2003).

Setelah kampus UI Depok mulai resmi digunakan, kawasan perumahan di Depok terus berkembang pesat, bukan hanya perumahan hunian milik rumah tangga tetapi juga perumahan sewa (tempat kos) bagi para mahasiswa dan juga berbagai kebutuhan pendukung lainnya, seperti tempat makan, tempat fotokopi, wartel, dan sebagainya. Dengan demikian, hubungan ekonomis fungsional semakin meluas di Kota Depok seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermukim di Depok.

Dalam konteks yang lebih luas, hubungan ekonomis fungsional di wilayah Depok juga terlihat dalam pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan yang terus menjamur di kota Depok sejak

pertengahan 1990-an. Akan tetapi, pertumbuhan pusat perbelanjaan tersebut hanya terpusat di sekitar Jalan Margonda Raya, yang membelah dua Kota Depok. Sementara kompleks-kompleks perumahan baru terus bertambah ke bagian barat dan timur wilayah Depok.

Besarnya jumlah kompleks perumahan dalam wilayah yang cukup luas pula, menciptakan peluang bagi berbagai usaha penyediaan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Para pedagang kebutuhan rumah juga tidak lagi pasif menunggu pendatang, melainkan langsung mendatangi pembeli di kawasan-kawasan atau kompleks-kompleks perumahan. Pedagang keliling yang bisa ditemui di hampir setiap kompleks perumahan di Depok antara lain: pedagang sayur, pedagang alat atau perabot rumah tangga dan pedagang jajanan atau makanan siap saji, seperti pedagang bakso, somay, roti, dan lain sebagainya.

Hal yang menarik untuk diungkapkan dari hubungan tatap muka atau interaksi langsung antara pedagang keliling dan pembelinya, adalah adanya polarisasi spasial dibalik interaksi itu. Di satu sisi Kota Depok memang berkembang dari sejumlah besar kawasan permukiman tertata atau kompleks perumahan yang dibangun oleh pengembang (*developer*) tertentu. Kompleks-kompleks perumahan inilah yang menjadi *demand factor* dari keberadaan para pedagang keliling. Sementara ada bagian lain dari Kota Depok, dimana terdapat sejumlah *cluster* yang berkembang secara alami dan cenderung tidak tertata. *Cluster-cluster* ini cenderung menjadi *supplier* bagi ketersediaan pedagang keliling di Kota Depok.

Pedagang bakso keliling adalah kelompok usaha yang paling dominan dalam *cluster-cluster* tersebut. Bappeda Kota Depok (2005) mencatat bahwa di 8 area *squatter* yang ada di wilayah Depok selalu terdapat unit usaha pedagang bakso keliling atau yang dikenal juga dengan istilah juragan gerobak bakso. Memang ada dua kategori aktor utama dalam usaha pedagang bakso keliling ini. Aktor yang pertama adalah juragan gerobak bakso, atau pemilik dari gerobak bakso yang dijadikan unit penjualan oleh para pedagang yang berkeliling dalam jarak tertentu dari rumah atau pangkalan si juragan. Sedangkan aktor kedua adalah pedagang keliling yang bekerja untuk juragan bakso atau juga menyewa gerobak milik juragan bakso. Kedua aktor ini umumnya hidup dalam satu komunitas tertentu, dan mempunyai keunikan dari segi ikatan primordialnya yang kuat.

Dengan demikian, permasalahan di Kota Depok bersumber pada pertumbuhan paralel permukiman kampung dan permukiman berbasis pengembang swasta, yang berpotensi menyebabkan konflik sosial. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Masalah-masalah ekonomi, yakni terkait dengan kondisi ekonomi keluarga warga kampung yang umumnya termasuk keluarga miskin dan juga para penghuni permukiman perumahan yang juga berasal dari golongan sosial-ekonomi menengah ke bawah.
2. Masalah-masalah fisik lingkungan, misalnya belum adanya pengelolaan sampah rumah tangga yang baik di lingkungan kampung, sehingga banyak sampah yang bertumpuk yang akhirnya mengundang banyak lalat dan bau yang tak sedap. Selain itu juga halaman kompleks perumahan yang sangat luas biasanya masih belum ditanami tanaman keras apapun, sehingga terkesan gersang
3. Masalah-masalah sosial kemasyarakatan, yakni masih adanya perselisihan antara warga penghuni kompleks perumahan dengan warga kampung di sekitar kompleks perumahan. Perselisihan tersebut misalnya menyangkut masalah transportasi, dimana warga perkampungan berkeberatan jika truk angkutan barang atau material sering berlalu-lalang hingga dapat merusak jalan. Selain itu juga masalah hewan piaraan warga kampung yang masuk ke kawasan kompleks perumahan dan merusak tanaman atau mengotori halaman rumah di kompleks permukiman.

### **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI SUATU ALTERNATIF**

Konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya bukanlah suatu konsep yang bersifat eksplisit ilmiah. Ekonomi kerakyatan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil dengan mengedepankan asas kekeluargaan (Mubyarto, 1999). Semangat ekonomi kerakyatan ini telah diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta ketika mendorong pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Jika ditelaah secara mendalam, konsep ekonomi kerakyatan memang tidak sama dengan salah satu aliran ekonomi dunia, yakni aliran klasik, aliran keynesian dan aliran neo-klasik (Sasono dalam Rudito et.all, 2003). Secara ekonomi maupun politik, konsep ekonomi kerakyatan adalah konsep yang unik. Ia menjadi suatu entitas yang mungkin memiliki persamaan dengan praktek ekonomi di Negara lain, namun sekaligus menunjukkan sejumlah perbedaan yang mendasar.<sup>3</sup>

Belakangan ini istilah ekonomi kerakyatan juga sering dipertentangkan dengan ekonomi neolib (yang sebenarnya dimaksud adalah aliran ekonomi neo-klasik). Sehingga konsep ekonomi kerakyatan lebih mengedepankan nuansa politisnya daripada pemahaman substansial dari makna dan penerapan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Akibatnya, ekonomi kerakyatan hanya menjadi jargon politik dan masih jauh dari penerapannya secara ideal.

Untuk dapat menerapkan ekonomi kerakyatan secara ideal memang diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang apa dan bagaimana ekonomi kerakyatan itu sendiri. Hal pertama yang menjadi prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan adalah keinginan untuk membantah rumusan ekonomi Marx (Duchrow, 1998) :

$$M - C - M$$

(*Money - Commodities - More Money*)

Dimana manusia, tanah dan bahkan uang itu sendiri adalah komoditas yang menjadi faktor produksi dasar dalam upaya memperoleh lebih banyak uang. Sebaliknya, ekonomi kerakyatan tidak ingin manusia menjadi semata-mata alat atau objek dalam proses produksi. Manusia justru harus menjadi pelaku utama ekonomi yang menjadi fokus dari proses ekonomi itu sendiri (Sasono dalam Rudito et.all, 2003). Pada tahap ini, konsep ekonomi kerakyatan menjadi suatu konsep yang dapat dipadankan dengan konsep pembangunan berpusat pada manusia atau *people-centered development* (Kuncoro, 1997).

---

<sup>3</sup> Misalnya bahwa pelaksanaan ekonomi kerakyatan mungkin agak sama dengan sistem ekonomi sosialis, tetapi justru memiliki banyak perbedaan mendasar dengan sistem tersebut.



## STRATEGI PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA

Konsep pembangunan berpusat pada manusia ini memang termasuk suatu paradigma baru yang berkembang di era 80-an sebagai respons terhadap kegagalan pola pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Midgley (1995) menjelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di seluruh dunia memang selalu menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuannya. Namun sayangnya, pembangunan tersebut sering mengalami distorsi dari hakekat dasar pembangunan itu sendiri yang ingin mewujudkan kesejahteraan manusia.

Midgley (1995), secara implisit juga ingin membantah pemikiran bahwa manusia hanyalah alat produksi dalam proses ekonomi. Ia bahkan menguraikan bagaimana proses ekonomi telah menciptakan kesenjangan bukan hanya antara orang kaya dengan orang miskin, melainkan juga antara tujuan pembangunan jangka pendek dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Tetapi ia secara tegas menolak bahwa proses pembangunan sama sekali harus dipisahkan dari mekanisme ekonomi. Midgley percaya bahwa pembangunan yang berorientasi ekonomi harus dilengkapi dengan keberpihakan pada sisi sosial kemanusiaan, dan ia menamakan konsepnya tersebut dengan istilah pembangunan sosial (*social development*).

Dengan demikian, sebagai suatu strategi pembangunan, pembangunan sosial seolah-olah ingin menahan semangat pertumbuhan ekonomi yang menggebu-gebu dan mengkonversikannya ke dalam perenungan yang mendalam terhadap pilihan-pilihan kebijakan yang tepat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lantas bagaimanakah hal tersebut dapat diwujudkan?

Midgley (1995) mengemukakan ada tiga cara yang harus dilakukan secara sinergis dalam melaksanakan pembangunan sosial yang dapat melengkapi perspektif pembangunan ekonomi yang sudah berjalan selama ini, yaitu:

- Pembangunan sosial oleh pemerintah
- Pembangunan sosial oleh masyarakat
- Pembangunan sosial oleh individu

Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan pembangunan sosial oleh individu-lah yang paling menonjol dimensi ekonomi, yang dapat dikatakan dapat menjelaskan kembali pemahaman tentang ekonomi kerakyatan.

Strategi pembangunan sosial oleh individu atau dikenal dengan "*social development by individual*" adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pentingnya peran individu dalam proses transformasi sosial yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif dan simultan (Midgley, 1995: 103-104). Dalam pendekatan ini, pembangunan sosial dilakukan melalui optimalisasi potensi oleh setiap individu yang ada. Potensi yang ada dalam masing-masing individu itu diharapkan akan meningkatkan *social progress* melalui berkembangnya semangat berusaha (*entrepreneurship spirit*) yang akan terkristalisasi dalam sebuah budaya berusaha yang cukup baik.

Akibat dari itu berkembanglah *small enterprises* yang dapat membuka peluang bagi individu-individu lain yang kurang beruntung, untuk dapat memperkuat keberfungsian dirinya sendiri atau *individual functioning* (Midgley, 1995: 112-113). Proses ini terus berlangsung sehingga berbagai permasalahan sosial dalam konteks yang sangat luas, pada akhirnya dapat diatasi oleh masing-masing individu dengan kapasitas diri yang cukup baik.

Dalam pendekatan pembangunan sosial oleh individu, intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dalam bentuk langkah-langkah untuk membantu orang-orang yang menjadi sasaran agar bisa mandiri dan berpartisipasi secara efektif dalam persaingan pasar. Bentuk programnya ada yang berskala besar, misalnya menciptakan budaya wirausaha (*enterprise culture*), ada pula yang berskala kecil, seperti membantu keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, usaha-usaha kecil dan sektor informal agar bisa bersaing di pasar. Peran pemerintah dalam menciptakan budaya wiraswasta terutama adalah bebaskan pasar dari penghambat-penghambat yang menghalangi orang untuk berusaha.

Dalam konteks otonomi daerah, strategi pembangunan sosial oleh individu ini menjadi semakin relevan untuk dikedepankan. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sangat mengagungkan kemandirian dan keberdayaan lokal berdasarkan pada potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom. Praktek-praktek kewirausahaan dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM) memang sudah seharusnya menjadi perhatian setiap pemerintah daerah dalam upaya mensinergikan percepatan pembangunan ekonomi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang lebih luas lagi.

### **PERSPEKTIF MODAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN**

Untuk melengkapi strategi pembangunan daerah yang sudah mengedepankan arti penting masyarakat di dalamnya tersebut, maka kerangka *asset/capital perspective* dapat menjadi sebuah konsep yang merangkum bagaimana konsep ekonomi kerakyatan dapat diterjemahkan ke dalam pemahaman pembangunan yang berpusat pada manusia.

Pembangunan tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Namun jika kembali menggunakan perspektif klasik pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, maka modal yang dimaksud adalah hanya modal finansial semata ataupun benda atau barang yang diberi harga tertentu, sehingga memiliki ukuran-ukuran finansial. Padahal ada banyak jenis modal yang berperan dalam proses pembangunan.

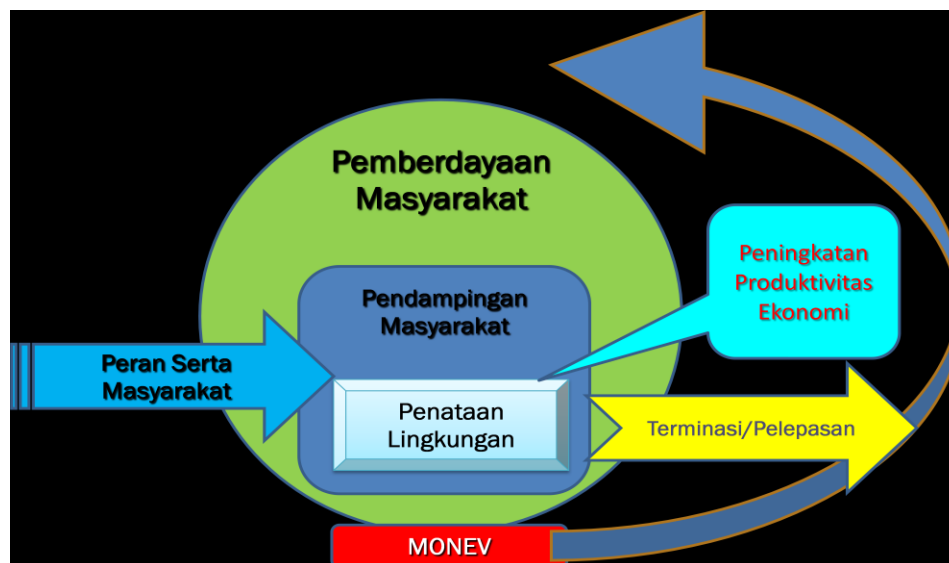
Green & Haines (2002) menawarkan ide bahwa sebenarnya ada banyak jenis modal selain modal finansial yang pada dasarnya mendorong terjadinya pembangunan, khususnya di tingkat lokal. Modal yang dimaksud ada 5 jenis yakni, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial dan modal lingkungan. Dalam beberapa penelitian ilmiah (Darmajanti, 2002; Prayitno 2004; Lubis, 2006) terbukti bahwa modal finansial bukanlah modal yang utama dalam pengembangan struktur sosial-ekonomi masyarakat. Bahkan dalam suatu studi tentang proses ekonomi yang dijalankan masyarakat golongan menengah ke bawah di Kota Depok,

menunjukkan bahwa justru modal sosial-lah yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha kecil yang dijalankan masyarakat (Lubis, 2006).

Dengan demikian, pemahaman yang tepat serta aplikasi dalam kombinasi struktur modal yang tepat, tentunya dapat menjamin pembangunan daerah yang lebih efektif. Jika kembali dikaitkan dengan konsep Midgley tentang pembangunan sosial, sangatlah tepat untuk mengatakan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan “pelengkap” agar dapat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. Tentunya hal ini, mungkin sudah disadari oleh sebagian besar para pengambil kebijakan di daerah, dan hanya tinggal menunggu waktu untuk dapat dilaksanakan secara luas di Indonesia.

#### **APLIKASI PEMBERDAYAAN TERINTEGRASI**

Salah satu contoh kasus pembelajaran tentang praktik pemberdayaan terintegrasi adalah sebagaimana yang diterapkan dalam Program Kampung Hijau sebagai berikut.



Program “Kampung Hijau” ini dilaksanakan selama 10 bulan dan terbagi atas 4 tahap, dimana pada tiap-tiap tahapan saling terkait dan menguatkan sehingga program yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Adapun tahapan tersebut adalah :

### 1. Tahap persiapan

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- Melakukan koordinasi dengan Pemda Kota Depok dalam rangka perizinan kegiatan
- Melakukan pendekatan awal kepada warga kampung dan juga penghuni kompleks perumahan agar warga berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.
- Melakukan sejumlah diskusi warga dengan kelompok yang berbeda-beda, untuk membangun kesadaran bersama tentang masalah yang dihadapi sekaligus mendapat masukan tentang berbagai alternatif solusi yang mungkin ada untuk mengatasi masalah tersebut

### 2. Tahap penguatan kelompok/pendampingan

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- Melakukan sosialisasi dan penyesuaian lapangan terhadap *grand design* kegiatan.
- Membentuk kelompok kerja yang terdiri dari maksimal 10 orang, untuk kemudian menyusun rencana kerja teknis yang merupakan hasil turunan *grand design* kegiatan.

Kelompok kerja ini mencakup:

- Kelompok kerja pengolahan/komposting sampah organik (pokja 1)
- Kelompok kerja produksi produk daur ulang sampah non-organik (pokja 2)
- Kelompok kerja pembibitan tanaman dan penghijauan (pokja 3)
- Kelompok kerja pembentukan kelembagaan koperasi (pokja 4)
- Melakukan diskusi-diskusi tematik bersama masing-masing kelompok kerja.

### 3. Tahap implementasi

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- Melakukan pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan tema masing-masing kelompok kerja, diantaranya: (pelatihan-pelatihan ini akan bersifat terbuka bagi warga kampung dan penghuni kompleks perumahan yang berminat)
  - Pelatihan pemilahan sampah organik dan non-organik

- Pelatihan pembuatan produk kertas daur ulang
- Pelatihan pembuatan kompos dari sampah dapur
- Pelatihan pembuatan produk kerajinan tangan dari bahan sampah non-organik
- Pelatihan pembibitan dan pemuliaan tanaman
- Pelatihan manajemen koperasi
- Menyiapkan pengadaan alat pengolahan sampah organik (komposter)
- Menyiapkan pengadaan bibit tanaman hias dan tanaman produktif
- Menyiapkan pengadaan alat produksi daur ulang kertas
- Menyiapkan dana pendamping pendirian koperasi warga rusunawa
- Menyiapkan pengadaan papan nama jalan untuk warga kampung
- Menyiapkan pengadaan nomor rumah untuk warga kampung

#### 4. Tahap terminasi

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- Mensinergikan kegiatan ini dengan perencanaan lanjutan di tingkat Pemda Kota Depok.
- Merintis kemitraan dengan pihak swasta untuk dapat mendukung kelanjutan kegiatan di masa yang akan datang.
- Menyiapkan rencana tindak lanjut yang akan dilanjutkan oleh mitra kegiatan ini.

### **AGENDA PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI-LINGKUNGAN KOTA DEPOK**

Dari uraian di atas tentunya dapat dipahami bahwa pembangunan daerah di era otonomi ini masih sulit melepaskan diri dari pola pembangunan masa orde baru, yang cenderung mengesampingkan manusia dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata. Sementara di lain sisi, proses politik lokal juga berakibat pada dialihkannya sejumlah isu pembangunan

menjadi jargon politis semata. Kota Depok, sebagai daerah otonom yang kurang lebih masih berumur satu dasawarsa ini tentunya juga mengalami sejumlah permasalahan yang sama.

Terkait dengan strategi konseptual yang ditawarkan di atas, maka ada sejumlah agenda penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

- Pertumbuhan sektor properti yang sangat pesat di Kota Depok merupakan indikasi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Dari sisi investasi, hal ini menunjukkan bahwa Depok adalah wilayah yang baik untuk berinvestasi dari sisi produsen perumahan maupun konsumen perumahan, baik dari wilayah Depok sendiri atau dari wilayah sekitar Depok. Namun hal ini patut menjadi catatan penting terkait dengan kegagalan pertumbuhan ekonomi di era orde baru. Pertumbuhan yang berlebihan berkecenderungan memperbesar kesenjangan ekonomi yang akan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Dari sisi sosiologis, pola ini akan menciptakan Kota Depok sebagai *dormitory town* (Lubis, 2006), yang tidak memiliki solidaritas sosial yang kuat dan cenderung mudah terpicu konflik sosial menyusul kesenjangan ekonomi yang ada.
- Sebagai kota satelit dari DKI Jakarta, Kota Depok harus siap menerima limpahan residu sosial-ekonomi yang tak mampu lagi ditampung oleh Jakarta. Masalah-masalah seperti meluasnya aktifitas ekonomi kecil berbasis masyarakat migran (seperti misalnya pedagang keliling, dan sebagainya) harus dapat ditangani secara bijak. Para perantau yang datang ke Jakarta dan wilayah sekitarnya memang semata-mata tertarik untuk mencoba melakukan usaha ekonomi informal. Bagi mereka, Jakarta dan wilayah sekitarnya hanyalah tempat untuk menjalankan usaha dan bukanlah tempat untuk hidup nyaman sejahtera. Akibatnya, keberadaan mereka menjadi pencetus terciptanya *squatter spot* atau bahkan *slum area* yang tidak baik untuk kehidupan mereka sendiri dan juga orang lain di sekitarnya.
- Terkait dengan masalah residu sosial-ekonomi di atas, Kota Depok—dan juga pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia—memiliki peluang untuk mengembangkan kerjasama daerah dalam rangka mewujudkan praktek ekonomi kerakyatan berbasis

multi modal pembangunan. Hal ini penting untuk mengendalikan lalu lintas komoditas sekaligus SDM yang cenderung masuk ke Kota Depok, namun cenderung pula menciptakan kekumuhan proses ekonomi di Kota Depok. Artinya, kerjasama antar daerah ini dapat menjamin terkendalinya mekanisme pasar yang menguntungkan bagi Kota Depok dan Pemda mitra kerja samanya.

- Sebagai bentuk komitmen dan upaya konkrit mendukung ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah Kota Depok sebaiknya mem'formal'kan atau me'legal'kan para pedagang informal migran dengan cara mendata secara berkala, agar ada kemudahan dalam memberikan akses informasi dan akses sumber-sumber pengembangan usaha lainnya. Hal ini juga terkait upaya kerja sama antar daerah di atas agar lebih fokus dan menguntungkan bagi Pemda Kota Depok.
- Pemberdayaan terintegrasi harus dipahami sebagai suatu entitas yang utuh, yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara proporsional, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sekaligus angka kemiskinan yang ada.
- Pemberdayaan terintegrasi mensyaratkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk secara berkelanjutan mendorong upaya pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat yang diberdayakan dapat secara permanen menularkan keberdayaannya kepada kelompok masyarakat lainnya yang butuh diberdayakan.

Terima kasih.

Diskusi lebih lanjut silahkan hubungi:

[rissalwan.lubis@gmail.com](mailto:rissalwan.lubis@gmail.com) atau [riha53@ui.ac.id](mailto:riha53@ui.ac.id)



## DAFTAR PUSTAKA

- Atchia, M., S. Tropp (1997). *Enviromental Management, Issues and Solutions*. New York: John Willey and Sons.
- Daljoeni (2003). **Geografi Kota dan Desa**. Edisi ke-2. Bandung: PT. ALUMNI.
- Gore, Charles (1984). **Regions in Question: Space, Development Theory and Regional Policy**. London & New York: Methuen & Co Ltd.
- Green, Gary Paul & Haines, Anna (2002) *Asset Building and Community Development*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Hidayat, Syarif dkk (2001) **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat**. Jakarta: Pustaka Quantum
- Husken, Frans dkk (1997) **Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia di Bawah Orde Baru**. Jakarta: Gramedia
- Jewson, Nick & MacGregor, Susanne (eds.) (1997). *Transforming Cities: Contested Governance & New Spatial Divisions*. London & New York: Rotledge.
- Karsito (ed.) (2002). **Bunga Rampai Kota Depok**. Depok: Penerbit Pandu Karya.
- Lubis, Rissalwan Habdy (2006). **PENGARUH MODAL SOSIAL, MODAL MANUSIA DAN MODAL FISIK TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PEDAGANG BAKSO KELILING: Suatu Studi Terhadap 66 Juragan Bakso Keliling di Kota Depok**. Tesis FISIP UI, tidak diterbitkan
- Midgley, James (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- Mitchell B., B.Setawan, D.H.Rahmi (2000). **Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan**. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Pearce, D., E.B.Barbier (2000). *Blueprint for a Sustainable Economy*. London:Earthscan Publications Ltd.
- Suryochondro, Sukanti (1993). **Masalah Perkotaan dan Perencanaan**. Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Mubyrato (1999) **Reformasi sistem Ekonomi**. Aditya Media
- Rudito, Bambang (2003) **Akses Peran Serta Masyarakat**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan